BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam rangka membangun dan memajukan ekonomi negara. Dari tahun ke tahun pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara guna pembangunan nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia (n.d.) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp1.019,56 triliun atau 85,65% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020.

Kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi permasalahan hingga saat ini, terlihat dari penerimaan pajak yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Rendahnya ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti tata cara perhitungan atau pelaporan pajak. Sedangkan ketidakpatuhan yang disengaja merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk menghindari pajak.

Di era pandemi ini, pemerintah terus berupaya untuk tetap memperoleh penerimaan terkait pajak. Salah satu upayanya yaitu dengan menerbitkan Undang-

Undang Cipta Kerja dan memperluas edukasi mengenai perpajakan menggunakan platform yang tersedia seperti media sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau lebih dikenal Undang-Undang Cipta Kerja ini disusun pemerintah dengan tujuan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya tarik iklim investasi dalam negeri, dan mewujudkan kepastian hukum. Klaster perpajakan yang memuat 4 undang-undang mengalami beberapa perubahan diantaranya yaitu perubahan atas UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UU KUP. Salah satu yang menjadi perhatian penulis adalah adanya perubahan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan berupa penurunan tarif sanksi administrasi bunga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (n.d.), sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menaati ketentuan undang-undang. Peraturan dan undang-undang merupakan pedoman bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau pun yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan tanggungan Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan), dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan instrumen untuk mencegah Wajib Pajak agar patuh kepada ketentuan perundang-undangan (Mardiasmo, 2009). Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan UU KUP yang berlaku.

Sanksi administrasi merupakan suatu bentuk jaminan untuk membayarkan sejumlah kerugian berupa bunga dan kenaikan kepada negara (Resmi, 2003). Sanksi administrasi bunga dikenakan bagi Wajib Pajak yang terlambat dalam

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi pidana merupakan instrumen terakhir yang digunakan pemerintah agar Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi pidana dikenakan bagi Wajib Pajak akibat menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar dan tidak menyampaikan SPT sama sekali sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Dalam pasal 113 UU Cipta Kerja mengatur mengenai perubahan beberapa bagian dari Undang-Undang KUP terutama terkait dengan sanksi bunga dan imbalan bunga. Melalui ketentuan tersebut, sanksi administrasi berupa sanksi bunga yang sebelumnya ditetapkan sebesar 2% (*fixed rate*) berdasar UU KUP menjadi lebih fleksibel, yaitu dengan menetapkan tarif bunga menurut suku bunga acuan ditambah persentase tertentu dan dibagi dua belas. Perubahan tarif yang lebih fleksibel dapat menguntungkan bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak bisa semakin sadar dan ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Penerapan akan perubahan sanksi administrasi bunga juga ditujukan agar Wajib Pajak bisa mematuhi ketentuan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan terkait tarif sanksi administrasi bunga ini menarik perhatian penulis untuk ditinjau kembali penerapan dan hubungannya terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

Penulis memilih KPP Pratama Temanggung sebagai objek tinjauan atas penerapan tarif sanksi administrasi bunga karena banyak Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar, serta penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung

yang terus mengalami perkembangan tiap tahunnya. Selain itu, Temanggung merupakan daerah kawasan industri karena terkenal akan produksi tembakaunya sehingga banyak pengusaha yang harus melaksanakan kewajiban pajaknya di KPP Pratama Temanggung. KPP Pratama Temanggung juga merupakan instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja mencakup dua kabupaten, yaitu kabupaten Temanggung dan kabupaten Wonosobo yang mana dua kabupaten tersebut memiliki potensi peluang usaha bagi masyarakat. Masih banyak pengusaha yang tidak membayarkan pajaknya yang dapat menunjang kemajuan daerah tersebut sehingga akan dikenakan sanksi administrasi. Maka, akan ditinjau penerapan perubahan tarif sanksi administrasi bunga berdasarkan UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung.

Perubahan tarif sanksi administrasi bunga berdasarkan UU Cipta Kerja akan ditinjau kembali hubungannya dengan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak, apakah penerapan tarif sanksi administrasi bunga di KPP Pratama Temanggung ini dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan membuat Wajib Pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini yang mendasari penulis untuk meninjau hubungan antara penerapan tarif sanksi administrasi bunga terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN TARIF SANKSI BUNGA PAJAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA TEMANGGUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana penerapan sanksi administratif bunga sebelum dan setelah berlakunya UU Cipta Kerja di KPP Pratama Temanggung?
- 2) Bagaimana penerapan sanksi administratif bunga setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung?
- 3) Bagaimana penerapan sanksi administratif bunga setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Temanggung?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk meninjau penerapan sanksi administratif bunga pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Cipta Kerja.
- 2) Mengetahui penerapan sanksi administratif bunga pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung.
- 3) Mengetahui penerapan tarif sanksi administratif bunga pajak berdasarkan UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Temanggung.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas penulis pada karya tulis tugas akhir ini dibatasi pada studi mengenai penerapan tarif sanksi administratif bunga

pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Penulis hendak meninjau penerapan aturan tarif sanksi administratif bunga terhadap penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, apakah peraturan mengenai perubahan tarif sanksi administrasi bunga ini telah dilaksanakan dengan baik dan memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Untuk perolehan data, penulis menggunakan data tahun 2020 sampai 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1) Bagi masyarakat

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat sebagai literatur atau referensi tambahan mengenai penerapan tarif sanksi administratif berdasarkan UU Cipta Kerja yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya.

2) Bagi KPP Pratama Temanggung

Penulisan ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk meninjau pelaksanaan atas perubahan tarif sanksi administratif bunga berdasarkan suku bunga acuan sebagai acuan untuk peningkatan kinerja pelayanan di KPP Pratama Temanggung terhadap masyarakat Temanggung.

3) Bagi penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis guna mengimplementasikan pengetahuan mengenai UU KUP.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I menjelaskan mengenai gambaran umum yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir yang akan disusun oleh penulis. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas penulis, tujuan penulisan, manfaat yang akan diberikan oleh penulis baik untuk masyarakat, pemerintah serta penulis, metode pengumpulan data untuk menunjang kualitas tinjauan, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menyusun karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II akan menjelaskan secara umum teori yang dijadikan landasan atas topik yang akan dibahas dan digunakan sebagai dasar untuk pembahasan di bab selanjutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III berisi tentang teori-teori yang kemudian akan dikorelasikan dengan hasil tinjauan di lapangan berupa hasil wawancara terkait penerapan perubahan tarif sanksi administrasi bunga berdasarkan UU Cipta Kerja. Selanjutnya, penulis akan meninjau juga perubahan tarif sanksi administrasi berupa bunga tersebut terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Temanggung berdasarkan data dan hasil dari wawancara dengan pihak di KPP Pratama Temanggung serta Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Selain itu, penulis juga akan meninjau penerapan tarif sanksi administrasi bunga terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Temanggung sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Cipta Kerja

dengan analisis korelasi untuk melihat hubungannya menggunakan data yang diperoleh.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV berisikan mengenai simpulan dari hasil tinjauan yang dilakukan oleh penulis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran untuk ke depannya.